BAB I
PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Prembun disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		3.1.2. Neraca
		3.1.3. Laporan Operasional (LO)
		3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp2.915.000 atau 145.75 % dari target anggaran sebesar Rp2.000.000.- dan mengalami kenaikan 45,75 % dari pendapatan tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,-.

Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	Realisasi 2022(Rp)
1	Retribusi Daerah	2.000.000	2.915.000	915.000	145,75	2.000.000

2.1.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp2.500.750.846,- dari anggaran sebesar Rp2.552.043.000 atau mencapai 97,99%. dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.342.908.000,- raealisasi Rp2.277.090.360 atau 97,19 % maka mengalami kenaikan sebesar 0,80 %.

a. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A 2023 (Rp)	REALISASI T.A 2023 (Rp)	PROSEN TASE %
B. Belanja			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	2.127.217.000	2.086.277.376	98.08
2. Belanja Barang dan jasa	389.180.000	382.178.470	98,20
3. Belanja Hibah	0	0	0.
Jumlah Belanja Operasi	**2.516.397.000**	2.468.455.846	98,09

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A 2023 (Rp)	REALISASI T.A 2023 (Rp)	PROSEN TASE %
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	0	0	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.646.000	32.295.000	90.60
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	**35.646.000**	**32.295.000**	**90.60**
JUMLAH TOTAL BELANJA	**2.552.043.000**	**2.500.750.846**	**97.99**

2. Realisasi Belanja Per Kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN T.A 2023 (Rp)	REALISASI T.A 2023 (Rp)	PROSENTASE %
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Kegiatan :Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**5.600.000**	**5.553.600**	**99,17%**
a	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	2.389.000	99.54 %
b	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000	3.164.600	98.89 %
Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**2.124.384.000**	**2.083.256.978**	**98,06%**
a	Subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.112.017.000	2.071.077.376	98,06%
b	Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12.367.000	12.179.602.	98.48 %
Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**2.400.000**	**2.309.000**	**96,21 %**
a	Sub kegiatan:Bimbingan teknis Implementasi peraturan peundang - undangan	2.400.000	2.309.000	96,21 %
Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah		**44.040.000**	**43.968.500**	**99,84 %**
a	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.600.000	5.596.500	99.94 %
b	Sub Kegiatan:Penyediaan bahan logistik kantor	12.800.000	12.772.000	99.78 %

URAIAN JENIS BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN T.A 2023 (Rp)	REALISASI T.A 2023 (Rp)	PROSENTASE %
c	Sub Kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.600.000	9.599.000	99.99 %
d	Sub Kegiatan :penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100 %
e	Sub Kegiatan :penyediaan bahan/material	12.000.000	11.960.000	99,68 %
f	Sub Kegiatan :penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.960.000	2.960.000	100.00%
g	Sub kegiatan:Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0	0	0
Kegiatan:Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**38.846.000**	**35.495.000**	**91.37 %**
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.646.000	32.295.000	90.60 %
b	Sub kegiatan :Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3.200.000	3.200.000	100.00 %
Kegiatan:Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**55.085.000**	**49.940.345**	**90,66 %**
a	subKegiatan :penyediaan jasa surat menyurat	880.000	880.000	100,00 %
b	Sub Kegiatan: penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.005.000	28.860.345	84,87 %
c	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20.200.000	20.200.000	100 %
Kegiatan:Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**63.071.000**	**62.590.580**	**99.24 %**
a	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	25.602.000	25.208.580	98,46%
b	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00 %
c	Subkegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	31.469.000	31.382.000	99,72 %
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**58.985.000**	**58.866.393**	**99,80%**
	Kegiatan: Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			
a	Sub Kegiatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	58.985.000	58.866.393	99,80 %

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**16.807.000**	**16.754.000**	**99,68 %**
	Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
a	Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.807.000	16.754.000	99,68 %
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**142.825.000**		**98.97 %**
	Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a	Sub Kegiatan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10.400.000	10.368.800	99,70 %
b	Sub Kegiatan: Rekomendasi pengangkatan dan pemeberhentian perangkat desa	12.800.000	12.774.000	99,80 %
c	Sub Kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12.800.000	12.761.000	99,70 %
d	Sub Kegiatan: fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5.600.000	5.597.000	99,95 %
e	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	14.400.000	14.370.000	99,79 %
f	Sub Kegiatan : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	79.625.000	78.977.650	99,19 %
g	Sub Kegiatan :Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	7.200.000	7.169.000	99,57 %
	JUMLAH TOTAL	**2.552.043.000**	**2.500.750.846**	**97,99 %**

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan
    1. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi Rp2.915.000 dari target sebesar Rp2.000.000 Atau 145,75 %.

b. Belanja
    1. Belanja yang tidak terserap sebagai berikut :
        a. Kegiatan :Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp7.000.000,- realisasi Rp6.999.000,- atau 99,93 karena adanya pembulatan.
        b. Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu angaran Rp1.940.278.000, realisasi Rp1.896.937.498,- atau 97,77 %, karena efisiensi anggaran.
        c. Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp50.106.000,- realisasi Rp50.044.000,- atau 99,88 %, karena efisiensi anggaran.
        d. Kegiatan: pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp27.000.000,- realisasi Rp25.645.000,- atau 94,98 % karena efisiensi anggaran.
        e. Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp62.024.000,- realisasi Rp42.509.194,- atau 68.54 % karena efisiensi anggaran.
        f. Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp67.500.000,- realisasi Rp67.014.768,- atau 99,28 % karena pembayaran pajak, bea dan perijinan kendaraan dinas sudah sesuai penagihan.
        g. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp103.000.000,- realisasi Rp101.943.000,- atau 98,97 % karena efisiensi anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000,- terealisasikan sebesar Rp2.915.000 atau 145,75% dari target yang ditetapkan.

Tabel III-1

Realisasi pendapatan SKPD Kecamatan PrembunTahun Anggaran 2023

Pendapatan	Anggaran (Rp) 2023	Realisasi (Rp) 2023	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	*) Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah)	2.000.000	2.915.000	915.000	145,75 %	2.000.000

Pendapatan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.915.000,- dan mencapai target sebesar 145,75% ada kenaikan 45,75 % dari realisasi Tahun 2022

1.a Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.315.000 Terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	2023		Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	*) Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
Pajak Daerah	0	0	0	0	0
Retribusi Daerah	2.000.000	2.915.000	915.000	145,75%	2.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
Lain-lain Pendpatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0	0
Jumlah	**2.000.000**	**2.915.000**	**915.000**	**145.75%**	**2.000.000**

	Anggaran	Realisasi
1. Pajak Daerah	Rp0	Rp0

Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

Pajak Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	0	0	0	0
Pajak Restotan	0	0	0	0
Pajak Hiburan	0	0	0	0
Pajak Reklame	0	0	0	0
Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0
Pajak Parkir	0	0	0	0
Pajak Air Tanah	0	0	0	0
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0	0	0	0
BPHTB	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2023 adalah Rp0,-

	Anggaran	Realisasi
2. Retribusi Daerah	Rp2.000.000	Rp2.915.000

Retribusi Daerah SKPD Kecamatan Prembun kabupaten Kebumen sebesar Rp2.315.000.

Retribusi	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Sewa Asset	2.000.000	2.915.000	145,75	2.000.000
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	0	0	0
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0	0	0	0
Retribusi Pelayanan Pasar	0	0	0	0

Retribusi	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) Rp.
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0	0	0	0
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	0
Retribusi Tempat Pelelangan	0	0	0	0
Retribusi Terminal	0	0	0	0
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	0	0
Retribusi Rumah Potong Hewan	0	0	0	0
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	0	0
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0	0
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0	0
Retribusi IZin Gangguan	0	0	0	0
Retribusi Izin Trayek	0	0	0	0
JUMLAH	**2.000.000**	**2.915.000**	**145,75**	**2.000.000**

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2023 Rp2.915.000,- terealisasi 145,75 % dengen rincian penyetoran sebagai beriku:

- Pendapatan pada tanggal 16 Pebruari 2023 sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sewa Pendopo Kecamatan Prembun oleh Atas Nama Koperasi KPRI PGP Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sewa /pinjam Pendopo Kawedanan Kecamatan Prembun oleh an. Panitia Halal bihalal Disdik Kec. Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp120.000,- (Seratus duapuluh ribu rupiah) sewa Alun-alun Kecamatan Prembun untuk permainan Istana Balon oleh An. Agus Supriyanto Desa Sidogede Rt.01 Rw 04 Kec. Prembun.

- Pendapatan pada tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sewa Pendopo Kecamatan Prembun oleh Atas Nama TK Pertiwi Prembun untuk Kegiatan Perpisahan Anak-anak TK.
- Pendapatan pada tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp125.000,- (Seratus duapuluh lima ribu rupiah) sewa Alun-alun Kecamatan Prembun untuk permainan adong-adong, mandi bola dan pemancingan oleh atas nama Mochamad Saeful Desa Bagung Rt 2 Rw 01 Kecamatan Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 7 Juli 2023 sebesar Rp250.000,- (Dua ratus Limapuluh ribu rupiah) sewa Alun-alun Kecamatan Prembun untuk kegiatan Sepeda santai oleh An. Puji Hantoro, Desa Bagung Kec. Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp120.000,- (Seratus Dua puluh ribu rupiah) sewa Alun-alun Kecamatan Prembun untuk wahana permainan anak-anak oleh An. Agus Supriyanto dengan alamat Desa Sidogede Rt 01 Rw 04 Kec.Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 27 September 2023 sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sewa Pendopo Kecamatan Prembun oleh An. Putri Aula Ulinisda Alamat. Jl.Raya no.161 Prembun Rt 01 Rw 02 Kec. Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sewa Pendopo Kecamatan Prembun oleh An. PNM Mekar Kutowinangun untuk kegiatan pelatihan nasabah PNM Mekar Kutowinangun.

3. Belanja -LRA

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Prembun TA 2023 adalah sebesar Rp2.468.455.846,- atuu 98,09 % dari anggaran sebesar Rp2.552.043.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	*) Realisasi 2022 (Rp)
BELANJA **Belanja Operasi**				
1.Belanja Pegawai	2.127.217.000	2.086.277.376	98,08	1.895.978.498
2.Belanja Barang dan jasa	389.180.000	382.178.470	98,20	376.656.862
3.Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Operasi	**2.516.397.000**	**2.468.455.846**	**98.09**	**2.272.635.360**

Belanja Modal				
1.Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.646.000	32.295.000	90,60	4.455.000
3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0,00	0,00
4.Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Belanja Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	35.646.000	32.295.000	90.60	4.455.000
JUMLAH BELANJA	**2.552.043.000**	**2.500.750.846**	**97.99**	**2.277.090.360**
SURPLUS /DEFISIT	**(2.550.043.000)**	**(2.497.835.846)**		**(2.275.090.360)**
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(2.550.043.000)**	**(2.497.835.846)**		**(2.275.090.360)**

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dengan TA. 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,80 %

Perhitungan kenaikan realisasi belanja sebagai berikut:

(penghitungan = 2.552.043.000 – 2.500.750.846 = 51.292.154, jadi 51.292.154 dibagi 2.500.750.846 = 0,02 %

Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 6,31 % dan Belanja Modal naik 1,60 %.

Perhitungan kenaikan realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Penghitungan Belanja operasi (2.516.397.000-2.468.455.846=47.941.154, sehingga 47.941.154 dibagi 2.468.455.846= 1,94 %

Perhitungan realisasi belanja modal sebagai berikut:

Penghitungan belanja modal (35.646.000-32.295.000) = (3.351.000)

Sehingga 3.351.000 dibagi 32.295.000 = turun (10,38 %)

3.1.1 Neraca

1. Aset

a. Asset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 tidak ada aset (nihil) dan 2022 sebesar Rp981.000,- Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada SKPD Kecamatan Prembun per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Lancar	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
4	Investasi Jangka Pendek	0	0
5	Piutang Pendapatan	0	0
6	Piutang Lainnya	0	0
7	Penyisihan Piutang	0	0
8	Beban dibayar dimuka	0	0
9	Persediaan	0	981.000
	Jumlah	0	981.000

1) Piutang

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Tidak terdapat pendapatan yang belum dibayar/ piutang.

2) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp981.000,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan

untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp0,-

No	Persediaan	TA 2023	TA 2022
1	Bahan habis pakai	0	981.000
2	Bahan/material	0	0
3	Barang lainnya	0	0
	Jumlah	0	981.000

3) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 Rp1.494.715.235,- dan 2021 tersaji sebesar Rp1.228.529.036.- Aset Tetap yang tersaji merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap SKPD Kecamatan Prembun per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut :

No	Jenis	TA 2022	Mutasi Tambah	TA 2021
1	Tanah	431.379.000	0	431.379.000
2	Peralatan dan mesin	1.135.204.729	287.746.600	847.458.129
3	Gedung dan Bangunan	841.169.333	0	841.169.333
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	5.000.000	0	5.000.000
5	Aset tetap lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi penyusutan aset tetap	(897.458.426)		(897.458.426)
	Jumlah	1.515.294.636	287.746.600	1.228.529.036

Penjelasan Aset Tetap:

a. Tanah

Aset tetap berupa tanah tidak ada mutasi sehingga aset tanah nilainya tidak berubah, terdiri dari :

1. Tanah Kampung yang berada di Jalan Jeruk nomor 5 Prembun seluas 1.411 M² dengan nomor sertifikat 7 tanggal 15 April 1985.

2. Tanah Kampung yang berada di Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun, seluas 6.952 M² dengan nomor sertifikat 3 tanggal 15 April 1985
3. Tanah lapangan lainnya di Prembun seluas 7.614 M² dengan nomor sertifikat 8 tanggal 19 September 1986.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin saldo awal Rp.847.458.129,-

Saldo Akhir Rp1.135.204.729,- sehingga pada tahun 2022 ada tambahan mutasi Rp.287.746.600,-

Perincian mutasi terdiri dari:

1. Penghapusan sepeda motor legenda 2 unit, Sepeda motor Win 3 unit,sepeda motor vega 1 unit, seluruhnya sebesar Rp56.787.700,-
2. Adanya mutasi sepeda motor ex Kepala Desa (Vega) 4 unit ke BPKPD seluruhnya sebesar Rp47.125.700,-

Dengan demikian nilai mutasi kurang Rp56.787.700,- ditambah Rp47.125.700,- samadengan Rp103.913.400,-

3. Sepeda Motor Kepala Desa sejumlah 13 Unit x Rp.29.785.000,- = Rp387.205.000,-
4. Pengadaan almari kaca 1 unit Rp.2.486.000,-
5. Pengadaan rak besi 1 unit Rp.1.969.000,-

Dengan demikian nilai mutasi tambah Rp387.205.000,- ditambah Rp2.486.000,- ditambah Rp1.969.000,- seluruhnya sebesar Rp391.660.000,-

Nilai tambah mutasi aset tetap sebesar Rp287.746.600,-

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang berada di Kecamatan Prembun tidak mengalami mutasi apapun.

Perincian gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung, seluas 40 M2, senilai Rp20.200.000,-
2. Bangunan Gedung, seluas 40 M2, senilai Rp20.200.000,-
3. Bagnunan Gedung permanen, seluas 161 M^2 senilai Rp81.305.000,-
4. Bangunan Gedung permanen, seluas 240 M^2 senilai Rp136.591.000,-
5. Bangunan Gedung Permanen, Pendopo ex Kawedanan Prembun, seluas 472,13 M^2 senilai Rp366.140.000,-

6. Bangunan Gedung Permanen luas 100 M^2 senilai Rp.10.000.000,-
7. Bangunan /Monumen bersejarah lainnya seluas 427,11 M^2 senilai Rp206.733.330,-
8. Bangunan Gedung instalasi lainnya (Mushola) seluas 15 M^2 senilai Rp.7.575.000,-

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan Jaringan yang berada di Kecamatan Prembun tidak mengalami mutasi apapun.

4. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.784.228,- dan 2021 tersaji sebesar Rp50.929.873,-

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
2	Pendapatan diterima di muka	0	0
3	Utang Belanja	59.784.228	50.929.873
4	Utang Jangka Pendek lainnya	0	0
5	R/K PPKD	0	0
	Jumlah	**59.784.228**	**50.929.873**

Rincian utang belanja terdiri dari :

- Rekenig Air sebesar Rp164.800,- dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2023.
- Rekening Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2022 sebesar Rp59.619.428,- dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023.

5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp1.460.890.763,-dan 2021 adalah sebesar Rp1.177.599.163,- dengan demikian terjadi penambahan nilai ekuitas sebesar Rp 283.291.600,-

3.1.2. LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen adalah pendapatan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.915.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan-LO	TA 2023	TA 2022
1	PAD -LO	2.915.000	2.000.000
2	Transfer -LO	0	0
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	0
	Jumlah	**2.915.000**	**2.000.000**

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan -LO tahun 2023 naik sebesar Rp915.000,- atau sebesar 45,75% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.2.000.000,-

b. Beban

Realisasi beban Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.222.854.287,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian beban TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan /penurunan %
Beban			
Beban operasi		2.222.854.287	
Beban tranfer	0	0	0
Beban luar biasa	0	0	0
Total beban		2.222.854.287	

c. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp2.222.854.287,- terdiri dari

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan%
1	Beban Pegawai		1.846.835.389	
2	Beban Barang dan Jasa		376.018.898	
3	Beban Bunga	0	0	0
4	Beban Subsidi	0	0	0
5	Beban hibah	0	0	0
6	Beban Bantuan sosial	0	0	0
7	Beban Penyusutan dan amortisasi	0	92.046.565	- 100 %
8	Beban penyisian piutang	0	0	0
9	Beban lain-lain	0	0	0
	Jumlah	**2.222.854.287**	**2.082.809.805**	**6,72**

Dari tabel diatas dapat diketahui beban operasi-LO tahun 2022 sebesar Rp. 2.222.854.287 naik sebesar 6,72 % dibandingkan tahun sebelumnya.

3.1.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.177.599.163,- dan tahun Anggaran 2021 Rp969.185.037,- devisit-LO tahun 2022 Rp2.220.854.287,- dan Tahun 2021 Rp2.081.018.805,-

B. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2022 Rp262.712.200,-
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun Anggaran 2022 Rp2.275.090.360,-
- Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.494.547.436,-

C. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp0 merupakan koreksi atas pos- pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2022, terdiri dari:

- Pengakuan atas bunga yang terutang sebesar Rp0
- Pengakuan atas beban dibayar dimuka sebesar Rp0
- Lain-lain sebesar Rp0

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Pos-pos asset yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas sebagaimana telah termuat dalam Bab III, indikator pencapaian target kinerja APBD dan Bab II, 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.

Pengungkapannya bahwa tanggungjawab SKPD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai perundang-undang.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintahan Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 50 (lima puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seluruhnya tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membuat laporan keuangan tahun 2022 dengan dasar hukum sebagai berikut :

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Teantang pengelolaan Keuangan Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan
f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta perwujudan akuntabilitas SKPD sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2023
PENGGUNA ANGGARAN

SUGENG PUJARWANTO,S.Sos
NIP. 196512141986031008